

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Abd. Khalid Hs. Pandipa^{a,1}, Adelia,^{b,2}

^{a,b} Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ email penulis pertama*; khalidpandipa@gmail.com

korespondensi penulis : khalidpandipa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 05-08-2022

Disetujui: 22-08-2022

Kata Kunci:

Implementasi,
Program Keluarga
Harapan (PKH)

Keywords:

Implementation,
Family Hope Program
(PKH)

ABSTRAK

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso tentang cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sebagian besar sudah tercapai, namun perlu peningkatan sumberdaya manusia dengan faktor pendorong dalam hal komitmen pimpinan politik serta kemampuan organisasi sudah membantu meringankan beban masyarakat dalam lingkup operasional kerja terutama dalam penyampaian program ke masyarakat. Faktor penghambat dalam hal banyaknya pemain (aktor) yang terlibat akan memunculkan tumpang tindih kebijakan yang akan membingungkan terutama masalah regulasi yang belum jelas pertanggung jawabannya.

Abstract : This research aims to find out implemenation of Family Hope Program (PKH) in Mapane Village, Poso Pesisir Sub-District, Poso Regency and the factors that influence it. The informants in this research were 13 people. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using interviews, documentation and observation. The results of the research obtained that the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Mapane sub- district, Poso Pesisir sub-district, Poso district regarding community coverage in obtaining services has largely been achieved, but the need to increase human resources with driving factors in terms of political leadership commitment and organizational capacity has helped alleviate community burden in the operational scope of work, especially in delivering programs to the community. Inhibiting factors in terms of the large number of players (actors) involved will give rise to overlapping policies which will be confusing, especially regulatory issues for which accountability is not yet clear.



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan suatu negara. Ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, disebut sebagai kemiskinan. Tidak terkecuali Indonesia dalam masalah kemiskinan global. Jarang ditemui kemiskinan yang disebabkan hanya oleh satu hal. Seseorang atau keluarga dapat menjadi miskin karena beberapa faktor yang saling terkait, seperti cacat, pendidikan rendah, kurangnya modal atau keterampilan bisnis, kurangnya kesempatan kerja, dipecat dari pekerjaan (PHK), tidak memiliki akses untuk jaminan sosial (pensiun, kesehatan, atau kematian), atau tinggal di daerah terpencil dengan sumber daya alam yang terbatas dan infrastruktur yang tidak memadai. Dari sudut

pandang konseptual, ada empat penyebab kemiskinan: individu, sosial, budaya, dan structural (Edi Suharto : 2013).

Menurut data BPS per September 2022, terdapat 26,36 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Program bantuan tunai bersyarat telah berhasil dilakukan oleh beberapa negara untuk memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 untuk mengatasi kemiskinan. PKH lebih dirancang sebagai upaya menciptakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu guna mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan yang ada.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan yang di klaim pemerintah sebagai salah satu bentuk program perlindungan sosial yang menangani masalah penanggulangan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PKH di Indonesia dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, PERPRES No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kelurahan Mapane merupakan bagian dari kecamatan Poso Pesisir yang masyarakatnya memiliki kehidupan sosial yang sangat beragam dan rata-rata mengenyam pendidikan mulai dari SMP hingga perguruan tinggi.

Program PKH pertama kali diluncurkan di Kelurahan Mapane pada tahun 2015 dan masyarakat telah merasakan manfaatnya hingga saat ini. Bantuan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam bentuk tunai, dengan penarikan yang diperbolehkan setiap tiga bulan sekali. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Mapane.

Data PKH di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah peserta PKH. Hal ini membuktikan bahwa PKH dapat mempengaruhi kenaikan kemiskinan di Kelurahan Mapane. Dimana diketahui bahwa jumlah peserta PKH pada tahun 2020 adalah 104 KK, pada tahun 2021 berjumlah 149 KK dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan jumlah peserta PKH berjumlah 159 KK.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kecenderungan untuk bersekolah dan menggunakan fasilitas kesehatan, namun saat ini belum ada undang-undang yang mewajibkan mereka untuk menggunakan bantuan keuangan pada program tersebut. Ini bertentangan dengan maksud awal Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menawarkan bantuan, sehingga perlu dilakukan analisis yang akurat terhadap sasaran bantuan program tersebut. Hal ini memerlukan penentuan jenis bantuan yang diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagaimana bantuan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian survei, Menurut Maolani dan Cahyana (2015:81), penelitian survei mengacu pada kajian tentang keadaan saat ini. Survei ini menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi (pengamatan lapangan), Wawancara dan Dokumentasi. Dalam hal metode analisis data, triangulasi biasanya digunakan untuk memulai analisis selama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. langkah-langkah dalam analisis data: Penyajian data, Reduksi data, dan Verifikasi atau penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat di kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program tersebut dan masyarakat dapat berkomunikasi langsung terhadap pemerintah setempat.

Meninjau dari hasil penelitian terkait komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pendamping dengan KPM PKH di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir dapat terbilang berjalan dengan baik. Namun upaya sosialisasi tersebut belum dilakukan secara konsisten sehingga perlu untuk langkah yang baik lagi ke depannya untuk menjalin informasi dan komunikasi antara pemerintah, pendamping PKH dan masyarakat sebagai peserta PKH.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait sumber daya bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping atau Petugas PKH sudah dilakukan dengan baik. Dari proses pendampingan tersebut menjadi dasar dalam pemutakhiran data penerima atau peserta PKH selanjutnya. Disisi lain, kesiapan aparatur kelurahan juga selalu siap dalam memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan program PKH meski sumber daya yang ada terbatas.

c. Disposisi

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait disposisi bahwa pelaksana kebijakan maupun masyarakat sangat mendukung dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane alasannya kebijakan ini akan membantu masyarakat, apalagi dimasa sulit seperti ini. Hal lain juga mendukung yaitu watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *Guideline* program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari hal yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Kesimpulan dari hasil wawancara tentang struktur birokrasi bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masih ada masyarakat yang masih merasa untuk pengurusan persyaratan penerima bantuan tersebut terlalu berbelit-belit namun memang hal tersebut sesuai prosedur dan masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, sehingga diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Komitmen Pimpinan Politik

Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat termasuk pula yang berada di wilayah Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, oleh karena itu perlu

komitmen Pemerintah sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan politik untuk segera membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dan payung hukum Peraturan Pelaksanaan dalam rangka mewujudkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Oleh karenanya, pimpinan politik yang ada di Kabupaten Poso secara umum dalam hal ini harus dapat memberikan perhatian terhadap program ini, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama merasakan akan manfaat bantuan tersebut dan kelak dapat mendorong pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan khususnya yang ada di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Kemampuan Organisasi

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterapkan pemerintah, pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. Yang paling penting dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka. Keterlibatan *stakeholder* dalam penyampaian program ini menjadi kunci utama dalam kesuksesan program tersebut. Sehingga masyarakat yang ada di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dapat terbantu dengan informasi yang diterima sehingga tidak akan merasa kebingungan lagi dengan segala persyaratan yang diminta.

Faktor Penghambat

Banyaknya pemain (Aktor) yang terlibat

Dari hasil observasi di lapangan, keterlibatan banyak aktor tersebut akan memunculkan tumpang tindih kebijakan yang akan membingungkan termasuk di Kelurahan Mapane khususnya masalah regulasi yang belum jelas karena sesungguhnya siapa yang bertanggung jawab kepada siapa itu yang belum ada kejelasan.

Pihak pemerintah desa sendiri dalam pelayanannya masih mengcover masyarakat yang masuk dalam program tersebut. Dan masalah penganggaran juga akan menjadi permasalahan jika beberapa pemain (aktor) turut mengurus hal tersebut.

Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri

Berdasarkan pada hal pengalaman yang sudah terjadi khususnya yang ada di Kelurahan Mapane, warga miskin tingkat sensitifitasnya tinggi serta rasa sabar yang kurang. Hal ini sering kali menjadikan kericuhan dalam pelayanan administrasi bagi warga miskin yang sedang mengurus syarat-syarat yang harus dipenuhi apalagi kalau ada warga yang tidak masuk dalam data penerima bantuan tersebut.

Pemerintah desa mengaku sering bersitegang dengan para warga miskin yang ingin mendapatkan pelayanan, hal ini juga ditengarai adalah proses ataupun prosedur dalam syarat-syarat administrasi yang ada. Seringkali, ketidaklengkapan syarat yang seharusnya dipenuhi menjadi problem tersendiri. Dengan keterbatasan pemahaman yang dimiliki warga dijadikan sebab terjadinya kesalahpahaman antara pihak pemerintah desa dengan warga miskin yang ingin mengakses Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut : Dari hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan Pogram Keluarga Harapan (PKH) di Kulurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso tentang cakupan masyarakat dalam mendapatkan bantuan sebagian besar sudah tercapai, namun perlu peningkatan sumberdaya manusia. Faktor pendorong terhadap implementasi Pogram Keluarga Harapan (PKH) dalam hal komitmen pimpinan politik yang ada di Kabupaten Poso senantiasa memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Untuk kemampuan organisasi pada dasarnya program ini sudah membantu untuk membantu dan meringankan beban masyarakat dalam lingkup operasional kerjaterutama dalam penyampaian program ke masyarakat. Faktor penghambat dalam hal banyaknya pemain (aktor) yang terlibat akan memunculkan tumpang tindih kebijakan yang akan membingungkan terutama masalah regulasi yang belum jelas pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, (2013). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, Cet-II Juli
- Agostiono, (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press
- Agus Sjafari. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Dewi Rahayu K, (2016). *Study Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fattah, Nanang. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kementerian Sosial Republik Indonesian, (2013). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*
- Kusuma Dewi, Rahayu. (2016). *Study Analisis Kebijakan*. Bandung: PustakaSetia
- Maolani, A. Rukaesih dan Ucu Cahyana. (2015). *Metodologi Penelitian. Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (1991) *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. (2000). *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Puspa Swara.
- Setiani, Tri. (2014). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat
- Singarimbun, M. (2006) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Soekanto, Soerjono. (1999). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres
- Suhendra, (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Suparlan, Parsudi. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Syaukani, dkk. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Yogya Pustaka.
- Wahab, Solichin Abdul, (2012) *Analisis kebijakan dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. (2006) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Siduarjo: Bayumedia